

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan sangat luas. Luas kawasan hutan di Indonesia yakni 105,86 juta hektar (Sinaga, 2023). Sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat mencakup individu, komunitas atau kelompok. Tanggungjawab pelaksanaan sehubungan dengan status penguasaan hutan (lahan dan yang tumbuh di atasnya) akan terdapat variasi hak akses dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya hutan dalam praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat. Kehutanan masyarakat yang dikelola oleh individu pada lahan miliknya akan menempatkan individu sebagai pemegang tanggungjawab dan akses sepenuhnya. Tanggungjawab dan akses individu akan makin berkurang pada sistem kehutanan masyarakat yang dikelola oleh komunitas sebagai kolektif atau kelompok, dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat (Lelloltery et al., 2021).

Secara keseluruhan luas hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan SK. Menhut No. 598/Menhut-II/2009 adalah $\pm 1.046.940$ (satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh) hektar, dengan rincian luas menurut fungsi sebagai berikut: Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam ± 179.165 Ha, Hutan Lindung ± 430.485 Ha, Hutan Produksi Terbatas ± 286.700 Ha, Hutan Produksi Tetap ± 150.609 Ha. Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kawasan hutan seluas $\pm 50.115,90$ Ha. Luas

hutan tersebut meliputi hutan lindung seluas $\pm 20.768,00$ Ha, hutan produksi seluas $\pm 7.119,00$ Ha, hutan Taman Nasional Gunung Rinjani seluas $\pm 22.146,00$ Ha, dan hutan penelitian/khusus seluas $\pm 82,90$ Ha.

Praktiknya, terdapat permasalahan yakni keterbatasan jumlah sumberdaya tenaga pengamanan hutan. Akibatnya, pengawasan hutan menjadi lemah dan okupasi atau penyerobotan kawasan hutan terus terjadi. Begitupula dengan kondisi di Nusa Tenggara Barat, di mana terdapat masalah berupa keterbatasan petugas pengawasan hutan. Jumlah petugas pengawas hutan dianggap tidak sepadan dengan luas wilayah yang sangat luas serta tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, misalnya sarana telekomunikasi dan transportasi (Makhdir, 2022).

Usaha untuk melindungi dan menggunakan hutan adalah merupakan salah satu unsur penting agar hutan tersebut secara lestari dapat memenuhi fungsinya, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Untuk mengadakan perlindungan, pengamanan, dan perbaikan terhadap hutan dan hasil-hasil hutan, maka telah dilakukan upaya-upaya rehabilitasi terhadap kawasan hutan tersebut dalam bentuk tindakan reboisasi dan juga melalui program HKm (Hutan Kemasyarakatan), yang merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan hubungan harmonis antara hutan dan masyarakat yang berada di sekitar hutan (DKP Lotim, 2001).

Menurut SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 31/Kpts-II/2001, Bab I pasal I tentang ketentuan umum, yang dimaksud dengan HKm adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Penerapan konsep pengembangan

HKm dimulai sejak pelita I melalui paket kegiatan penghijauan dan reboisasi, tetapi keikutsertaan masyarakat di sekitar kawasan hutan masih sangat terbatas, sehingga manfaat pembangunan kehutanan belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan surat Menteri Kehutanan No. 103/ Menhut-V/ 1994 tanggal 15 Juli 1994, maka pembangunan HKm dikembangkan lagi dalam skala yang lebih luas dengan menunjuk Perum Perhutani sebagai pelaksana kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dalam kawasan hutan, dilaksanakan melalui pola HKm sesuai SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 677/Kpts-II/1998 jo. SK Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001, yaitu pengelolaan HKm melalui pengembangan kelembagaan yang mandiri dan mengakar di masyarakat dengan didukung oleh hutan yang potensi lestari dalam satu kesatuan sistem HKm (DKP Lotim, 2001). Selanjutnya, melalui pola pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) ini diharapkan keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dirinya sendiri terutama masyarakat di sekitar kawasan dan peserta HKm, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidupnya atau keadaan sosial ekonominya.

Keberhasilan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat setempat. Keharmonisan antarwarga, adanya budaya gotong royong, serta hubungan yang erat antar anggota kelompok tani hutan menjadi modal penting dalam mendukung program ini. Selain itu, tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan HKm turut menentukan keberhasilan program. Keterlibatan masyarakat menciptakan rasa

memiliki terhadap hutan sehingga mendorong pengelolaan yang berkelanjutan. Dukungan sosial ini juga memperkuat komitmen bersama untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga.

Hasil observasi awal peneliti menunjukkan bahwa pada kawasan hutan produksi yang ada di Kecamatan Sambelia terdapat kawasan hutan yang diberikan Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) kepada “Koperasi Wana Lestari” seluas 420 Ha. Hutan Kemasyarakatan ini mulai diterapkan pada tahun 1999. Peserta HKm adalah anggota “Koperasi Wana Lestari” sebanyak 507 kepala keluarga yang dibagi menjadi 20 blok/kelompok tani dengan rata-rata luas kepemilikan 1,00 Ha per orang. Lokasi HKm ini tersebar di dua desa yaitu Desa Sugian dan Desa Dara Kunci. Namun, belum diketahui tentang adanya perubahan ekonomi pada masyarakat peserta program HKm setelah mengikuti program HKm.

Dampak ekonomi dari program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat memberikan perbedaan signifikan dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Program HKm membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, seperti komoditas pertanian tumpangsari. Berbeda dengan sektor ekonomi lainnya yang umumnya bergantung pada pekerjaan formal atau sektor jasa, HKm menawarkan alternatif ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan. Selain itu, HKm mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa yang sebelumnya bergantung pada pekerjaan musiman atau migrasi kerja. Dengan demikian, HKm tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal secara inklusif dan berkelanjutan.

Pada sisi lain, dampak spesifik program Hutan Kemasyarakatan (HKm) bagi masyarakat yang ikut terlibat umumnya menunjukkan kemajuan dan perkembangan ekonomi yang signifikan. Masyarakat yang terlibat dalam HKm mendapatkan akses legal untuk mengelola lahan, memperoleh hasil hutan bukan kayu, serta mendapat pelatihan dan pendampingan yang meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Hal ini membuat taraf hidup masyarakat meningkat dan usaha ekonomi lokal semakin berkembang. Sebaliknya, masyarakat yang tidak terlibat dalam program HKm cenderung stagnan, karena tidak mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut dan tetap bergantung pada sektor ekonomi konvensional yang terbatas. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kelompok yang aktif dalam HKm dengan yang tidak, baik dari segi pendapatan maupun pembangunan kapasitas ekonomi.

Terdapat tantangan yang dihadapi oleh petani HKm yakni kurangnya dukungan dari pemerintah, khususnya dalam hal pendanaan dan penyediaan tenaga penyuluh kehutanan. Minimnya alokasi dana membuat kegiatan pengelolaan dan pengembangan kawasan HKm berjalan lambat dan kurang optimal. Selain itu, keterbatasan jumlah penyuluh kehutanan menyebabkan kurangnya pendampingan teknis dan edukasi kepada masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Hal ini berdampak pada rendahnya kapasitas kelompok tani hutan dalam mengelola lahan dan mengembangkan usaha berbasis hasil hutan. Terkait demikian, peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan agar program HKm dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, akan dilakukan kajian mendalam terkait

dengan pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan perubahan ekonomi masyarakat. Terkait demikian, judul penelitian yang digunakan adalah “Dampak Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) terhadap Perubahan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni dampak program Hutan Kemasyarakatan (HKm) terhadap pendapatan petani yang ikut program HKm dan petani yang tidak ikut program HKm di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur serta dampak program Hutan Kemasyarakatan (HKm) terhadap kelembagaan petani peserta program HKm di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisa dampak program Hutan Kemasyarakatan (HKm) terhadap pendapatan petani yang ikut program HKm dan petani yang tidak ikut program HKm di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur.
2. Mengetahui dan menganalisa dampak program Hutan Kemasyarakatan (HKm) terhadap kelembagaan petani peserta program HKm di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dilakukan penelitian ini:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial-ekonomi kehutanan, khususnya mengenai keterkaitan antara pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan perubahan kondisi ekonomi masyarakat pedesaan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam meningkatkan efektivitas program HKm di daerah.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam pengelolaan hutan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.

c. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pendamping program

Hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk merancang program pendampingan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung kegiatan HKm.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang dampak sosial dan ekonomi dari

pengembangan program Hutan Kemasyarakatan di wilayah lain.

E. Keaslian penelitian

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hombokau, Tasirin dan Walangitan (2023) berjudul “Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Dalam Program Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit V”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis potensi biofisik lokasi ijin hutan kemasyarakatan, menganalisis kondisi ekonomi, kelembagaan, sosial dan budaya masyarakat, menganalisis serta menganalisis *stakeholder* dalam menentukan strategi pengembangan hutan kemasyarakatan di kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean. Analisis data dilakukan dengan analisis SWOT. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi pengembangan hutan kemasyarakatan di kawasan hutan lindung gunung lembean yaitu strategi *turn around*. Strategi yang dilakukan yaitu memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok, memfasilitasi pelaku usaha yang ingin berinvestasi dengan kelompok masyarakat melalui kerjasama yang saling menguntungkan, dan mengembangkan pola sistem agroforestri yang memiliki produk dan nilai ekonomi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Martapani, Fauzi dan Naparin (2021) berjudul “Dampak Hutan Kemasyarakatan terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju KPH Kayu Tangi)”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan

program Hutan Kemasyarakatan, dan menganalisis manfaat Hutan Kemasyarakatan terhadap aspek sosial ekonomi anggota kelompok Masyarakat Peduli Gambut (MPG) Sukamaju sebagai kelompok yang mendapat IUPHKm. Analisis data dilakukan dengan validasi data, penyajian data, verifikasi dan analisis data serta penetapan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program Hutan Kemasyarakatan (HKM) memberikan dampak positif terhadap masyarakat baik pada aspek sosial maupun aspek ekonomi. HKm bisa menjadi solusi bagi petani dalam menjamin legalitas mereka sesuai dengan tujuan pemerintah sebagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak sosial yang terjadi pada kelompok tani HKm MPG Sukamaju berupa peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan perhutanan sosial yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Selain itu, juga berdampak terhadap penyelesaian konflik lahan, perubahan perilaku masyarakat dalam membuka lahan tanpa bakar, dan penguatan kembali budaya gotong royong yang mulai memudar. Dampak ekonomi yang terjadi pada kelompok tani MPG Sukamaju berupa adanya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, pengembangan peluang usaha, dan kemitraan bisnis.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Grifaldrin, Hafizianoor dan Asyisyifa (2021) berjudul “Analisis Dampak Program Hutan Kemasyarakatan terhadap Aspek Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut)”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan komoditas usaha dari program HKm dan perkembangannya di Desa Telaga. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa jenis usaha yang menjadi komoditas HKm desa Telaga yaitu budidaya jamur tiram dan budidaya lebah madu. Pendapatan anggota KTH Subur Makmur diluar HKm sebagai pendapatan pokok lebih besar dari pendapatan usaha HKm. Pendapatan yang diperoleh dari usaha HKm perbulannya rerata Rp 600.000 dan pendapatan diluar HKm rerata Rp 3.735.000. Kontribusi usaha HKm anggota KTH Subur Makmur reratanya sebesar 15, 96%. Kontribusi pendapatan tersebut berasal dari hasil penjualan madu dan jamur tiram. Kontribusi pendapatan non HKm sebesar 84,04%.

Keempat, penelitian yang dilakukan Asgar dan Bonita (2019) berjudul “Studi Pendapatan Masyarakat Pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Senggigi Kabupaten Lombok Barat”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pendapatan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan (HKm) di Desa Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Analisis data dilakukan dengan analisis keragaan pendapatan masyarakat pinggiran hutan meliputi analisis pendapatan pendapatan masyarakat pinggiran hutan, analisis R/C rasio, dan analisis titik impas (*Break Event Point*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya berbagai jenis tanaman yang berada di atas lahan petani terdiri dari Tanaman Berkayu diantaranya Mahoni (*Sweitenia mahagoni*) dan Nyamplung (*Calophyllum inophyllum*), Tanaman MPTS seperti, Nangka (*Artocarpus heterophyllus*) dan Melinjo (*Gnetum gnemon*), Pisang (*Musa acuminata*) dan Kopi (*Cofee sp*), Tanaman Bawah Tegakan/Eempon-empon seperti Kunyit (*Curcuma longa*), Laos (*Alpinia galangga*) dan Jahe (*Zingiber officinale*). Untuk Pendapatan tertinggi adalah Rp 21.698.333 dan pendapatan terendah adalah Rp 5.182.500 dan

pendapatan rata-rata dari responden adalah Rp 9.876.730.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Yakin, Malik, Yusuf dan Husni (2019) berjudul “Dampak Hutan Kemasyarakatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga Sekitar Hutan di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dampak hutan kemasyarakatan terhadap pengentasan kemiskinan rumah tangga sekitar hutan di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) Rata-rata total pendapatan rumah tangga masyarakat sekitar hutan mencapai Rp 20.057.950 yang terdiri dari Rp 13.597.950 (67,79%) dari sektor pertanian dan Rp 6.460.000 (32,21%) dari sektor non pertanian dengan pendapatan per kapitan sebesar Rp 4.667.549 per tahun; 2) Berdasarkan kriteria BPS, masyarakat sekitar hutan di Kecamatan Batukliang Utara masuk kategori tidak miskin, selanjutnya berdasarkan kriteria Sayogyo menghasilkan kategori hampir miskin dan kriteria Bank Dunia menghasilkan kategori miskin, sehingga ketiganya memberikan tingkat kesejahteraan yang relatif berbeda; 3) Adanya HKM telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan karena mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebesar 22,18 persen dan telah mampu mengentaskan kemiskinan 7,5 sampai 22,5 persen.

Keenam, penelitian yang dilakukan Abdillah dan Rahman (2024) berjudul “Peran Hukum Optimalisasi Hutan Kemasyarakatan (HKM) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kuripan Selatan”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis hambatan pelaksanaan pemanfaatan hutan

kemasyarakatan (HKm) dan upaya untuk mengoptiimalkan HKm guna perekonomian masyarakat di Desa Kahuripan. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HKm Desa Kuripan Selatan terdapat 4 faktor penghambat yakni faktor yuridis, faktor sosiologis, faktor ekologis dan faktor ekonomis. Salah satu yang dapat dilakukan untuk pengoptimalan HKm yakni melakukan penguatan sistem kelembagaan agar kelola kawasan dan kelola usaha dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, terhadap pemegang izin pemanfaatan dan pengelolaan HKm wajin mengetahui adanya hak, kewajiban dan larangan dalam pengelolaan HKm. Dalam hal ini terus dilakukan pendampingan berupa pengawasan, monitoring dan evaluasi oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan HKm serta diharapkan adanya aturan yang menindaklanjuti berupa PERDES terkait pengelolaan dan pemanfaatan HKm di Desa Kahuripan Selatan guna HKm Desa Kahuripan Selatan dapat teroptimalkan untk kesejahteraan masyarakat.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Diaz, Seran dan Kaho (2022) berjudul “Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dengan Pola Agroforestry di Desa Rana Kolong Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan Hutan Kemasyarakatan dengan Pola agroforestry serta untuk mengetahui pola agroforestry yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Analisis data dilakukan dengan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang harus diterapkan adalah dengan menggunakan

atau memanfaatkan peluang dan kekuatan sebesar-besarnya atau dengan memanfaatkan kegiatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Rekomendasi strategi yang diperoleh untuk meningkatkan strategi pengembangan HKm dengan pola *agroforestry* di daerah penelitian strategi adalah strategi SO (*Strengths-Opportunities*). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan *Agroforestry* di Desa Rana Kolong dengan menggunakan pola *Agrisilvikultur* dalam bentuk sistem pagar hidup.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Sari, Senoaji dan Suhartoyo (2019) berjudul “Efektivitas Program Perhutanan Sosial dalam Bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Tanjung Alam Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui efektivitas program Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Analisis data dilakukan dengan analisis spasial (sistem informasi geografis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Tanjung Alam Kabupaten Kepahiang berjalan efektif dalam hal melestarikan kawasan hutan, hal ini ditunjukkan dengan perubahan kondisi tutupan lahannya. Pada tahun 2000 kebun campuran 121,530 ha dan lahan pertanian 43,470 ha, pada tahun 2010 terlihat bahwa terjadi peningkatan penutupan lahan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, penggunaan lahan untuk lahan pertanian cenderung berkurang yaitu 18,056 Ha, dan kebun campuran meningkat menjadi 146,944 Ha. Lahan didominasi oleh kebun campuran dimana pohon-pohonnya rapat dengan kanopi menutupi areal. Pengamatan pada tahun 2017, untuk kebun campuran

sedikit berkurang menjadi 141,460 ha, sementara lahan pertanian bertambah menjadi 23,540. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Tanjung Alam Kabupaten Kepahiang termasuk dalam stratifikasi tajuk dengan 4 stratum yaitu stratum A, stratum B, stratum C dan stratum D. Hutan kemasyarakatan (HKm) memberikan kontribusi besar dalam pendapatan peserta yaitu sebesar 93% dengan rata-rata penghasilan peserta sebesar Rp 28.758.829,- per tahun. Artinya peserta sangat bergantung terhadap keberadaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai sumber pendapatan mereka. Sebagian besar peserta hutan kemasyarakatan Desa Tanjung Alam Kabupaten Kepahiang masih tergolong kurang sejahtera yaitu 24 responden dari 41 responden penelitian, 13 responden tergolong sejahtera dan 4 responden tergolong lebih sejahtera.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Awang, Andayani dan Suryanto (2018) berjudul “Karakteristik Petani dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (HKm) terhadap Pendapatan Petani di Kulon Progo”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi petani HKm Kulon Progo dan kontribusi HKm terhadap pendapatan petani. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani HKm rata-rata berusia 53 tahun, pendidikan petani rendah karena 53% lulusan SD. Rata-rata jumlah tanggungan keluarga 4 orang. Rata-rata luas lahan andil 2.128 m² dan rata-rata luas lahan milik 2.947 m² sehingga termasuk petani gurem. Tujuh puluh persen petani HKm hutan produksi dan 47,3% petani HKm hutan lindung masuk ke dalam kategori miskin sekali dan miskin. Kontribusi HKm pada pendapatan petani adalah 6,4% pada hutan produksi dan 4,8% pada

hutan lindung. Kecilnya kontribusi dari HKm berimplikasi pada upaya peningkatan pendapatan petani melalui pengembangan potensi tanaman empon-empon dan umbi-umbian serta potensi wisata.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Nahlunnisa (2021) berjudul “Studi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengelolaan berupa komposisi tanaman serta sistem agroforestri yang berada dikawasan hutan yang dikelola oleh kelompok HKm Gapoktan Mertesari di wilayah Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi tanaman yang berada dikawasan hutan yang dikelola oleh kelompok HKm Gapoktan Mertesari terdiri dari jenis kayu lokal seperti Ajan/Klicung, Rajumas, Klokos, Gaharu, Majagau yang tumbuh secara alami. Selain itu, untuk memperkaya keanekaragaman jenis tanaman dengan jenis tanaman kayu-kayuan seperti Sengon, Mahoni dan MPTs seperti Nangka, Menté dan Asam dengan prosentase tumbuh mencapai 80%. Pola *agroforestry* pada kawasan tersebut adalah *multiple cropping* tanpa ada jarak tanam karena tanaman kehutanannya sudah rapat.